

BAB 1

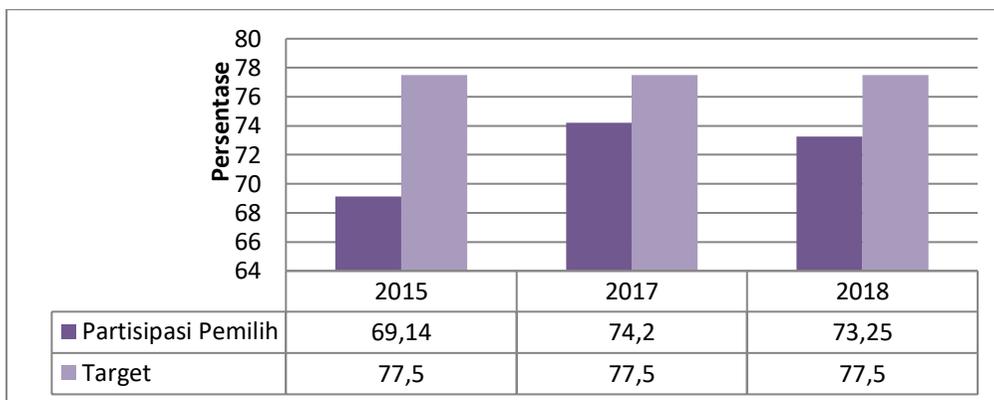
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dikatakan sebagai pengejawantahan prinsip *good governance* yaitu prinsip partisipasi publik. Publik secara langsung terlibat pada proses penentuan keputusan untuk memilih kepala daerah (Legowo 2005). Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 disebutkan bahwa gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Kedaulatan yang berada ditangan masyarakat daerah diwujudkan dalam bentuk partisipasi rakyat dengan menyalurkan aspirasi politik guna memilih pemimpin di daerahnya serta ikut andil dalam mempengaruhi dan menentukan kebijakan daerah sekaligus arah masa depan daerahnya (Yuristianti 2018).

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Indonesia digelar sejak tahun 2015. Pemilihan kemudian berlanjut pada tahun 2017, 2018 dan 2020. Meskipun pelaksanaannya berjalan dengan lancar, pemilih yang menggunakan hak suara menjadi sorotan. Partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2015 – 2018 secara umum masih rendah dari target yang ditetapkan

oleh Komisi Pemilihan Umum. Capaian partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak masih rendah dari target KPU sekitar 75,5 persen (Harahap 2016).



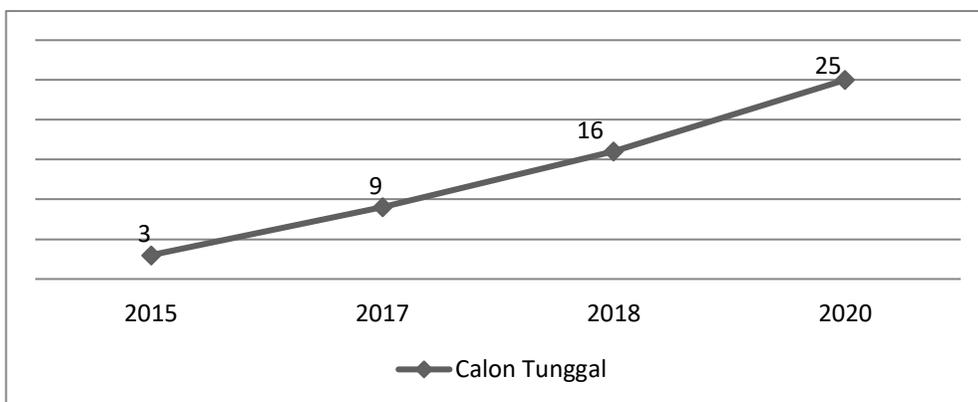
Gambar 1.

Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak

Sumber: *diolah peneliti, 2020* (Andayani 2018; Kumparan 2017; Priyasmoro 2017)

Tidak hanya partisipasi pemilih, munculnya calon tunggal dalam pilkada serentak menjadi perhatian tersendiri. Walaupun keberadaan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah tidak bertentangan dengan konstitusi, tetapi dalam proses implementasi demokrasi di Indonesia, calon kepala daerah tunggal harus dapat diatasi oleh partai politik yang ada untuk membuat koalisi dan menentukan calon dari partai mereka (Sari 2020). Data Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menunjukkan keberadaan calon tunggal kepala daerah terus meningkat selama tiga kontestasi terakhir. Pada pilkada tahun 2015 terdapat tiga daerah yang memiliki satu calon. Jumlah itu terus naik, berturut-turut sembilan calon tunggal pada pilkada 2017 dan 16 pada tahun 2018 (BBC Indonesia 2020). Sementara Pilkada serentak tahun 2020 yang berlangsung di 270 daerah baik

provinsi, kota maupun kabupaten di Indonesia memunculkan 25 pasangan calon tunggal (Nugraheny 2020).



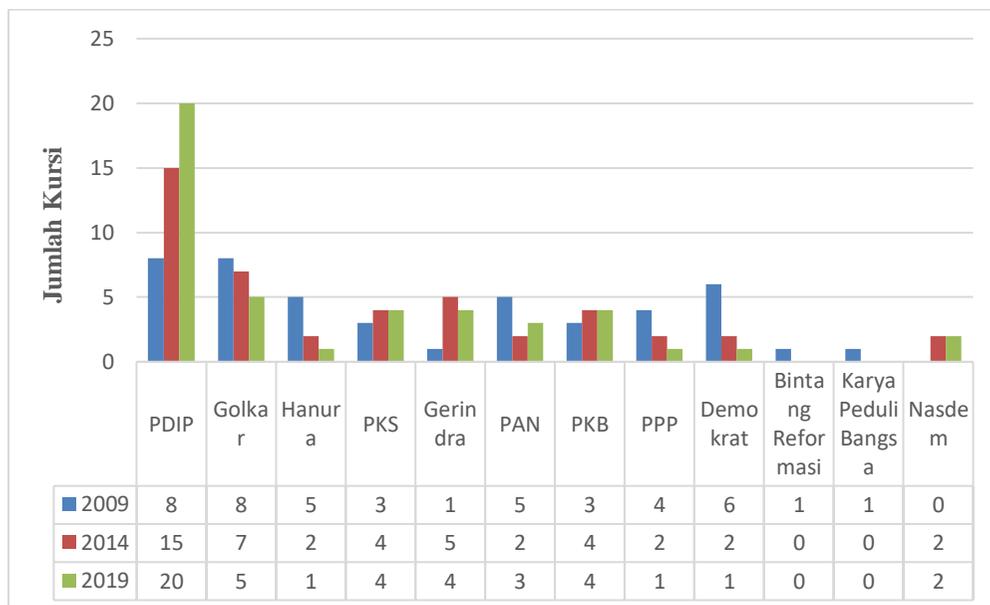
Gambar 2.
Trend Calon Tunggal Pilkada Serentak

Salah satu daerah yang menghadirkan pasangan calon tunggal ialah Kabupaten Ngawi. (Detik 2019). Hadirnya pasangan Ony Anwar Harsono dan Dwi Rianto Jatmiko sebagai calon tunggal menjadi fenomena baru dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Ngawi (KPUD Ngawi 2020b). Palsalnya, sejak digelar pilkada dari tahun 2005 hingga tahun 2015 selalu diikuti lebih dari satu pasangan calon. Tahun 2005 diikuti 4 pasangan calon, kemudian tahun 2010 hadir 5 pasangan calon dan sedangkan tahun 2015 menghadirkan 2 pasangan calon kepala daerah (Intana 2010; Tempo 2005; Wibisono 2015a). Oleh karenanya pilkada ini dirasa berbeda karena tidak ada kompetisi dalam kontestasi.

Minimnya kontestasi pasangan calon tidak dipungkiri telah berlangsung sejak pilkada tahun 2005 yang hanya diikuti 2 pasangan calon. Pasangan Budi Sulistyono dan Ony Anwar Harsono yang merupakan pasangan petahana mendapatkan dukungan dari mayoritas partai yang ada di DPRD Ngawi. Terdapat 9 partai pendukung antara lain partai PDIP, PKS, Golkar, PKB, Nasdem, Hanura, PAN, Demokrat, dan Gerindra. Koalisi pendukung pasangan ini memiliki total 43 kursi dari 45 kursi yang ada DPRD. Hanya ada satu partai yang tidak mengusung calon atau bersikap oposisi yaitu partai PPP. Berhadapan dengan pasangan Agus Bandono – Adi Susilo yang maju lewat jalur perseorangan/independen, pasangan petahana Budi Sulistyono dan Ony Anwar Harsono tampil sebagai pemenang dalam pilkada tahun 2015 (Sudarmojo 2015).

Tidak dipungkiri komposisi dukungan politik yang mengarah pada satu pasangan calon cenderung terjadi sejak pilkada tahun 2015. Pasangan petahana Budi Sulistyono dan Ony Anwar Harsono yang diusung partai PDIP justru memperoleh dukungan mayoritas partai yang ada di DPRD. Koalisi yang dibangun dalam mendukung pasangan ini terlihat besar dan hanya menyisakan partai PPP yang menjadi oposisi. Padahal perolehan kursi partai diluar partai PDIP dalam 3 kali pemilihan legislatif sebenarnya mampu bagi partai untuk membangun koalisi dan mengusung pasangan calon

sendiri. Adapun perolehan kursi partai politik hasil pemilihan legislatif tahun 2009 hingga 2019 di Kabupaten Ngawi sebagai berikut:



Gambar 3.

Perolehan Kursi Partai Pemilihan Legislatif Kabupaten Ngawi

Sumber: *Data diolah Penulis, 2020* (KPUD Ngawi 2009, 2019; Purwanto 2014)

Meskipun terjadi kecenderungan perolehan kursi partai PDIP yang semakin meningkat, partai lain memiliki kesempatan untuk mengusung dan membangun koalisi sendiri. Mengacu UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa *Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan* (Pailingan 2019). Syarat dukungan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD ini sebenarnya tidak

terlalu sulit bagi partai atau koalisi partai di Ngawi untuk mengusung figur baru.

Perolehan kursi partai pada tahun 2019 ini sebenarnya tidak membuat sulit untuk membangun koalisi atau mengusung kader sendiri untuk maju dalam kontestasi. Meskipun terjadi kecenderungan perolehan peningkatan kursi yang mengarah pada partai tertentu, tidak menjadi halangan untuk partai dalam membangun koalisi. Namun Pilkada 2020 justru terjadi kembali koalisi besar yang mendukung pasangan Ony Anwar Harsono dan Dwi Rianto Jatmiko. Pasangan ini didukung semua partai yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Ngawi dengan total 45 kursi. Dengan tagline “Oke Menang Bersama” terdapat 10 partai pendukung antara lain, PDIP, Golkar, PKS, Gerindra, PKB, Nasdem, Demokrat, Hanura, PAN, dan PPP yang mendukung pasangan Ony Anwar Harsono dan Dwi Rianto. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui faktor penyebab munculnya calon tunggal dan implikasi kehadiran calon tunggal pasangan Ony Anwar Harsono dan Dwi Rianto terhadap partai politik di Kabupaten Ngawi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Faktor apakah penyebab munculnya pasangan tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2020?

2. Implikasi apa atas terjadinya pasangan tunggal terhadap partai politik dan dinamika politik di Kabupaten Ngawi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab munculnya pasangan tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2020.
2. Untuk mengetahui implikasi pasangan tunggal terhadap partai politik dinamika politik di Kabupaten Ngawi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi partai politik di Kabupaten Ngawi untuk mengevaluasi program rekrutmen dan kaderisasi sehingga dapat menghasilkan kader terbaik untuk maju pada pemilihan kepala daerah yang akan datang.
2. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi partai politik di Kabupaten Ngawi untuk mempromosikan kader terbaik dan meningkatkan daya saing kader dalam kompetisi pemilihan kepala daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat guna mempermudah dalam memahami struktur penelitian ini. Penulisan penelitian ini terdiri atas enam bagian utama dan secara umum terbagi menjadi bagian – bagian sebagai berikut:

Bab I	Pendahuluan	Bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian
Bab II	Tinjauan Pustaka	Bab ini terdiri dari kajian pustaka, literature review, kerangka berpikir definisi konseptual, definisi operasional
Bab III	Metodologi Penelitian	Bab ini terdiri dari: pendekatan penelitian, lokasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data
Bab IV	Dinamika Politik Kabupaten Ngawi	Bab ini membahas secara umum dinamika politik pemilihan kepala daerah dari tahun 2005 hingga tahun 2015 dan partai politik dalam pemilihan legislatif daerah
Bab V	Fenomena Calon	Bab ini membahas fenomena

Tunggal Pilkada kehadiran pasangan tunggal Kabupaten Ngawi dengan menguraikan aspek pramatisme partai politik, rekrutmen dan kaderisasi partai politik, koalisi yang dibangun partai politik, dan implikasi kehadiran pasangan tunggal.

Bab VI Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran penelitian

Daftar Pustaka